

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak daerah adalah pungutan wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa mendapatkan imbalan secara langsung yang bersifat memaksa yang dapat digunakan guna pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan peraturan daerah provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang pajak daerah, salah satu jenis pungutannya adalah pajak air permukaan.

Pajak air permukaan adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan yang dilakukan oleh orang pribadi atau perusahaan yang bersifat komersil. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada dilaut maupun di darat. PAP atau disebut pajak air permukaan merupakan salah satu sumber pendapatan yang membantu dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) [7]

Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan (CPDP) Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang adalah unit pelaksana yang dibawah oleh Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Jawa Barat. Salah satu tugasnya adalah dalam melaksanakan kegiatan operasional dalam penyelenggaraan pelayanan perpajakan. Dalam pelaksanaannya, bagian pajak permukaan air bekerja sama dengan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) untuk mengetahui Harga Dasar Air (HDA) sebagai dasar penetapan Nilai Perolehan Air Permukaan (NPA).

Dalam mengurus PAP, wajib pajak harus melaporkan volume permukaan air serta pengisian formulir pendataan terkait pengajuan pajak air permukaan ke pihak PSDA yang sebelumnya telah mendapatkan Surat Izin Pengambilan Pemanfaatan Air (SIPPA), SIPPA sendiri mempunyai masa berlaku yaitu selama 1 bulan, setelah itu PSDA akan mengeluarkan Nilai Perolehan Air (NPA), dari NPA di hitung pajaknya dan akan dihasilkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) oleh CPDP.

Proses administrasi di bagian pajak air permukaan sudah terkomputerisasi yaitu menggunakan Sistem Informasi Pajak Air Permukaan (SIMPAP) yang berbasis *desktop*, akan tetapi aplikasi hanya bisa dioperasikan melalui perangkat sistem dan jaringan internal bagian pajak air permukaan sendiri dan tidak dapat di akses di luar bagian tersebut, serta disisi lain wajib pajak harus berulang kali mendatangi kantor CPDP dan PSDA dalam mengurus pajak air permukaan sehingga tidak efisien bagi wajib pajak.

Berdasarkan pembahasan diatas dapat diusulkan sebuah aplikasi sistem informasi berbasis *web* yang dapat melengkapi fungsionalitas dari kekurangan sistem yang dimiliki, dimana aplikasi akan mengelola pendaftaran wajib pajak, perizinan, pengajuan pengambilan pemanfaatan air dan pembayaran pajak. Aplikasi yang dalam perhitungan pembayarannya juga akan menangani kurang bayar, lebih bayar, denda dan sanksi administratif berupa bunga dan akhirnya akan menghasilkan jurnal dan buku besar.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah proyek akhir ini sebagai berikut.

1. Bagaimana membuat aplikasi yang mampu melakukan pengajuan pengambilan dan pemanfaatan air?
2. Bagaimana membuat aplikasi yang mampu melakukan perhitungan pajak air permukaan?
3. Bagaimana wajib pajak memperoleh surat ketetapan pajak daerah secara *online*?
4. Bagaimana membuat aplikasi yang mampu menangani denda dan sanksi administratif pajak air permukaan?
5. Bagaimana membuat aplikasi yang mampu membuat jurnal dan buku besar?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan dari pembuatan aplikasi ini adalah sebagai berikut.

1. Mampu melakukan pengajuan pengambilan dan pemanfaatan air yang terlebih dahulu melakukan perizinan pengambilan air permukaan.
2. Mampu melakukan perhitungan pajak air permukaan.
3. Mampu membuat Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) secara *online*.
4. Mampu menangani denda dan sanksi administratif pajak air permukaan.
5. Mampu membuat jurnal dan buku besar.

1.4 Batasan Masalah

Batasan masalah dari pembuatan proyek akhir ini sebagai berikut.

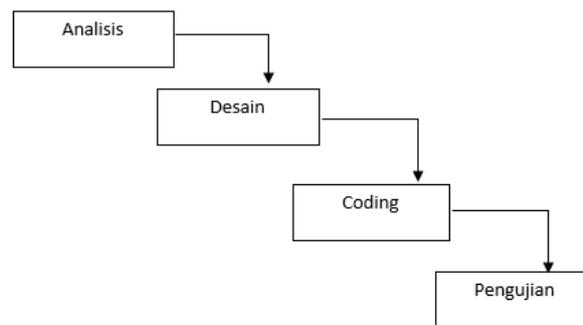
1. Aplikasi ini tidak menangani keberatan dan banding.
2. Aplikasi ini tidak menangani angsuran dan penundaan pembayaran pajak.
3. Aplikasi ini hanya dapat digunakan oleh wajib pajak yang telah memiliki NPWPD.
4. Tahapan dalam pengumpulan data metode pengembangan aplikasi ini hanya sampai tahapan pengujian.

1.5 Metode Pengerjaan

Metode pengerjaan yang digunakan untuk pembuatan proyek akhir ini adalah *Software Development Life Cycle* (SDLC) atau sering disebut juga *System Development Life Cycle* dengan menggunakan model perancangan *waterfall*. Model *waterfall* sering juga disebut model sekuensial linier (*sequential linier*) atau alur hidup klasik (*classic life*). Model *waterfall* menyediakan pendekatan alur hidup

perangkat lunak sekuensial atau terurut dimulai dari analisis, desain, *coding*, pengujian. [1]

Berikut ini adalah gambar tahapan model *waterfall*. [1]



Gambar 1- 1
Tahapan *Waterfall*

1. Analisis

Pada tahap ini adalah pengumpulan kebutuhan yang harus dipenuhi sebagai sumber perancangan oleh program yang akan dibuat. Pada tahap ini, yang dilakukan adalah menggambarkan proses bisnis sistem yang sedang berjalan dan sistem usulan menggunakan diagram aktivitas, diagram *use case* untuk menggambarkan antara sistem dengan pengguna. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian langsung yang dilakukan melalui wawancara ke tempat studi kasus yaitu Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang.

2. Desain

Proses ini tujuannya adalah untuk merepresentasikan kebutuhan-kebutuhan di atas ke dalam bentuk rancangan pembangunan sistem, sebelum proses *coding* dimulai. Dalam tahap desain akan menggunakan konsep berorientasi objek, menggunakan ERD dan *Unified Modeling Language* (UML) untuk mendesain kebutuhan perangkat lunak berdasarkan analisis tahap sebelumnya.

3. Penulisan Kode Program/*Coding*

Setelah pembuatan tahap desain selesai maka tahap selanjutnya adalah proses *coding* dimana akan membuat *interface* hasil rancangan *input* dan *output*. Bahasa pemrograman yang akan digunakan adalah *framework* PHP *CodeIgneter* dan *database* MySQL (*My Structured Query Language*).

4. Pengujian

Setelah proses *coding* selesai, maka tahap selanjutnya adalah pengujian. Pengujian pada perangkat lunak dari segi fungsionalitas dan memastikan bahwa semua bagian sudah di uji, untuk meminimalkan kesalahan dan memastikan keluaran yang dihasilkan sesuai dengan yang diinginkan. Untuk pengujian yang akan dilakukan adalah dengan menggunakan *BlackBox Testing*.

1.6 Jadwal Pengerjaan

Tabel 1- 1
Jadwal Pengerjaan

Kegiatan	Waktu / minggu																															
	Oktober 2016				November 2016				Desember 2016				Januari 2017				Februari 2017				Maret 2017				April 2017							
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
Analisis Kebutuhan	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																				
Desain perancangan sistem									■	■	■	■																				
Coding program													■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Pengujian																																
Pembuatan laporan	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■